

kait kelindan

JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (JETP) DAN KORUPSI

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, Juni 2024



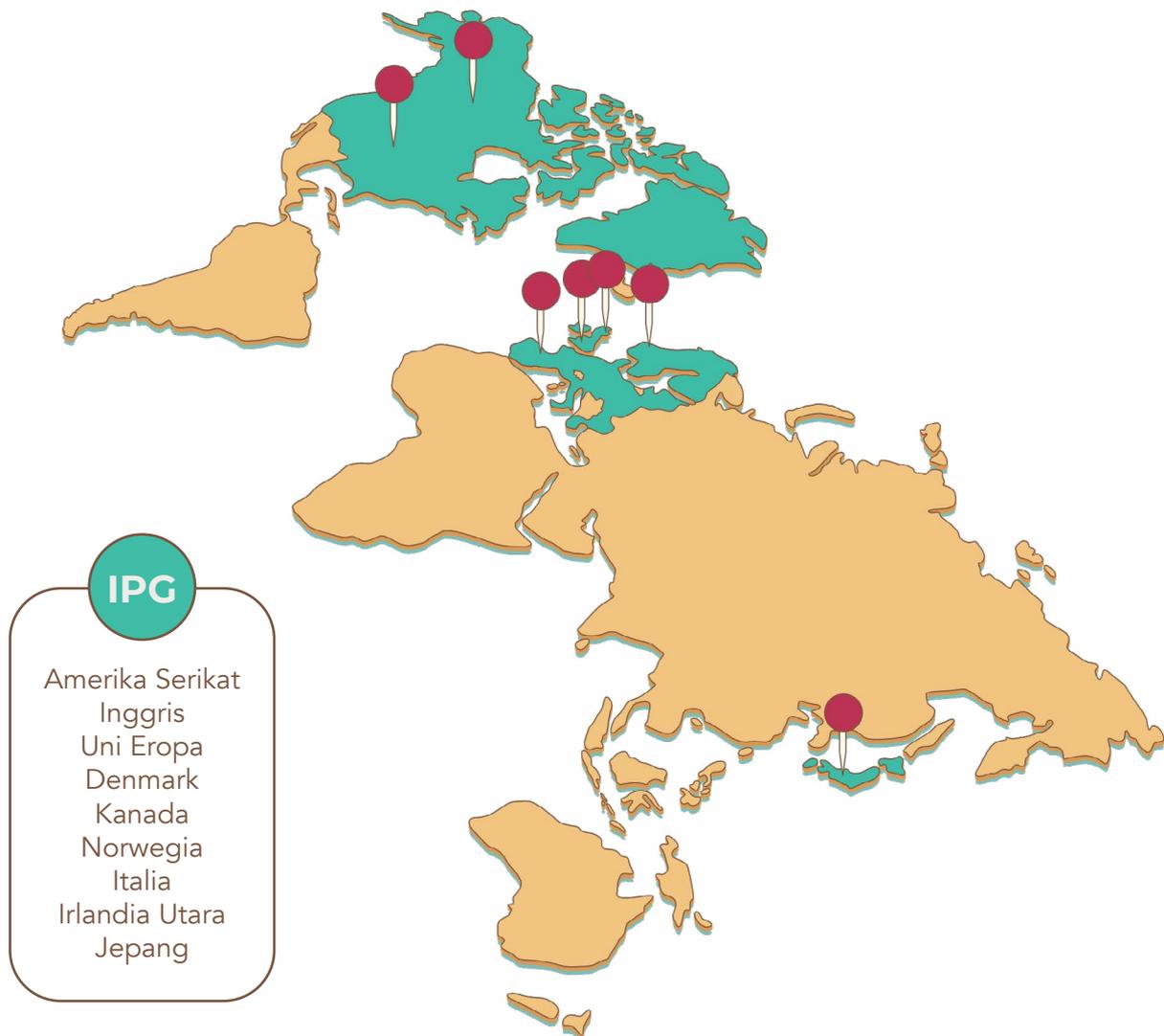
Apa itu JETP?

Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke teknologi yang rendah karbon.¹

Siapa yang Menginisiasi JETP?

Negara maju meliputi Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa menginisiasi JETP. Negara-negara maju tersebut tergabung dalam *International Partnership Group (IPG)*.²

Negara lain seperti Denmark, Kanada, Norwegia, Italia, Irlandia Utara, dan Jepang juga tergabung dalam IPG dan mendukung pelaksanaan JETP.



1 350 Indonesia, "Panduan Memahami JETP di Indonesia", <https://350.org/id/wp-content/uploads/sites/17/2023/05/Panduan-Memahami-JETP.pdf>

2 Katadata, "Inilah Pendanaan Energi JETP yang Diincar Indonesia", 10 November 2021, <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/636cbe3d980dc/inilah-pendanaan-transisi-energi-jetp-yang-diincar-indonesia>

Kapan JETP Indonesia diluncurkan?

JETP Indonesia diluncurkan dalam momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022.

Mengapa JETP Indonesia diluncurkan?

Indonesia terikat komitmen mempertahankan batas pemanasan global sebesar 1,5 derajat celcius. Komitmen tersebut disepakati oleh 196 negara pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim/UN *Climate Change Conferences* (COPs) di Paris pada tahun 2015.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian Paris 2015 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Siapa pemberi dana JETP?

Negara-negara maju yang tergabung dalam IPG adalah pemberi dana JETP kepada negara berkembang. Selain itu, koalisi lembaga keuangan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) juga memobilisasi pendanaan.

GFANZ beranggotakan lebih dari 550 perusahaan mencakup pemilik aset, manajer aset, penyedia layanan keuangan, konsultan investasi, bank, dan asuransi.³

Besaran Dana JETP

Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan JETP sebesar USD 20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun.⁴ Jumlah tersebut berasal dari IPG dan Kelompok Kerja GFANZ (*Glasgow Financial Alliance for Net Zero*). IPG dan GFANZ masing-masing memobilisasi dana sebesar USD 10 miliar.⁵ Pembiayaan publik berasal dari IPG, sementara pembiayaan swasta difasilitasi oleh GFANZ.⁶

Bagaimana Rincian Pendanaan JETP?

Pendanaan yang berasal dari IPG disebutkan dapat mencapai USD 11,6 miliar⁷ dengan komposisi sekitar 60% atau setara dengan USD 6,9 miliar berupa pinjaman konsesi

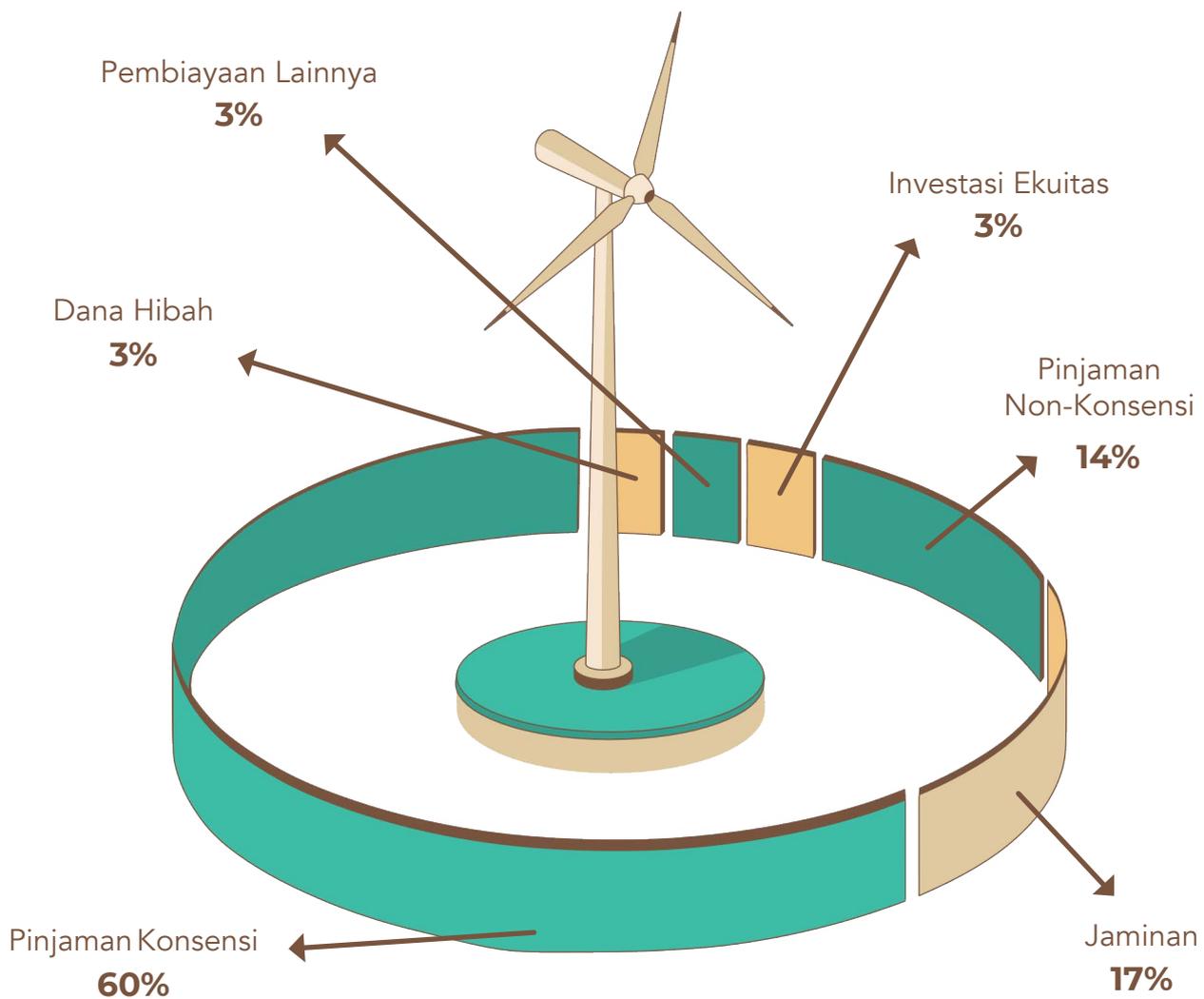
3 350 Indonesia, "Panduan Memahami JETP di Indonesia", <https://350.org/id/wp-content/uploads/sites/17/2023/05/Panduan-Memahami-JETP.pdf>

4 Kementerian ESDM RI, "Sekretariat JETP Terbentuk, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi", 18 April 2018, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>

5 Katadata Media Network, "Rencana Pembiayaan JETP Indonesia", Mayoritas Berupa Utang, 2 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/rencana-pembiayaan-jetp-indonesia-mayoritas-berupa-utang>

6 JETP Indonesia, "Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023", 21 November 2023, https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_f_id-1703731480.pdf

7 JETP Indonesia, "Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023", 21 November 2023, https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_f_id-1703731480.pdf



(*concessional loan*).⁸ Pinjaman konsesi ini adalah pinjaman dengan bunga yang lebih rendah serta tenor dan masa tenggang pembayaran yang lebih longgar dari standar pasar.

Secara jumlah, sumber pembiayaan terbesar berikutnya adalah berupa jaminan (*guarantee*) yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat sebesar USD 2 miliar, serta pinjaman non-konsesi sebesar USD 1.59 miliar. Pinjaman non-konsesi sendiri adalah pinjaman dengan tingkat bunga sesuai standar pasar dengan tenor lebih panjang.⁹

Selain tiga jenis pembiayaan yang berasal dari IPG tersebut, terdapat pembiayaan lain berupa investasi ekuitas sebesar USD 384,5 juta, pembiayaan lain-lainnya sebesar USD 345,3 juta, dan dana hibah sebesar USD 292,3 juta. Jenis pembiayaan terakhir ini masing-

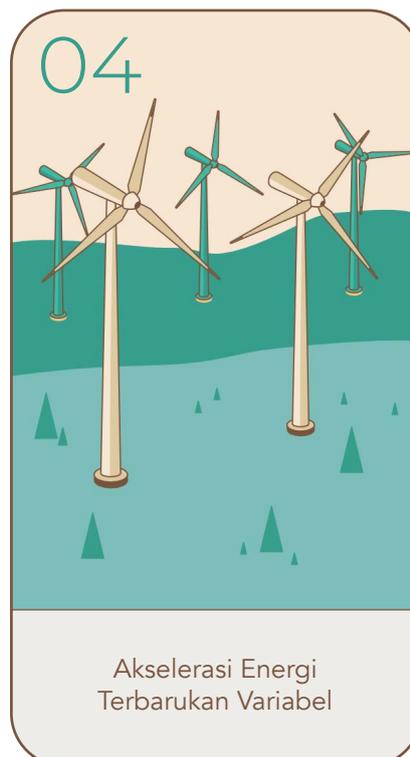
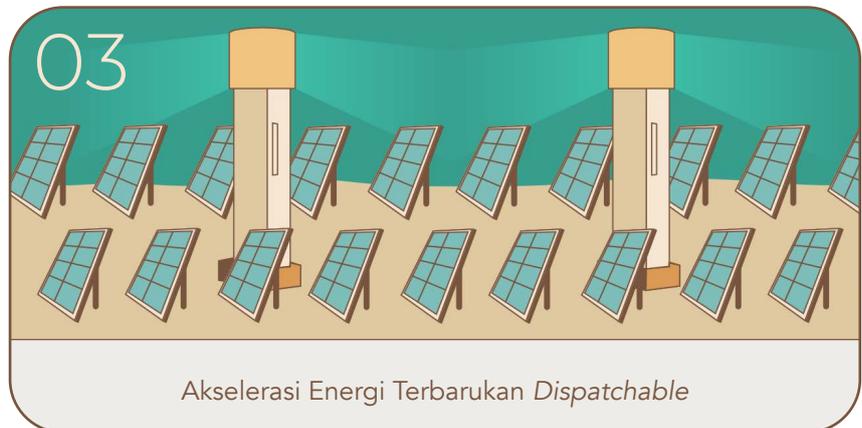
8 Katadata Media Network, "Rencana Pembiayaan JETP Indonesia", Mayoritas Berupa Utang, 2 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/rencana-pembiayaan-jetp-indonesia-mayoritas-berupa-utang>

9 Databoks, "Rencana Pembiayaan JETP Indonesia Mayoritas Berupa Utang", 2 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/rencana-pembiayaan-jetp-indonesia-mayoritas-berupa-utang>

masingnya menyumbang persentase sekitar 3% dari total dana yang berasal dari IPG.¹⁰ Sedangkan, rincian skenario pembiayaan yang berasal dari GFANZ belum diketahui.

Apa Saja Fokus JETP?

Terdapat 5 fokus investasi JETP¹¹



10 Databoks, "Rencana Pembiayaan JETP Indonesia Mayoritas Berupa Utang", 2 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/rencana-pembiayaan-jetp-indonesia-mayoritas-berupa-utang>

11 JETP Indonesia, "Ringkasan Eksekutif Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023", 21 November 2023, https://jetp-id.org/storage/executive-summary-jetp-cipp-2023-vshare_id-1700472973.pdf

Krisis Iklim, JETP, dan Korupsi

Apa Kaitan Korupsi dan Krisis Iklim?

Korupsi dapat memperparah krisis iklim, dan upaya penanggulangan krisis iklim dapat terhambat akibat korupsi.

Sebagai contoh, korupsi terkait alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan dan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dapat memperparah krisis iklim. Sementara korupsi terkait transportasi umum dan proyek infrastruktur penahan banjir dapat menghambat upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

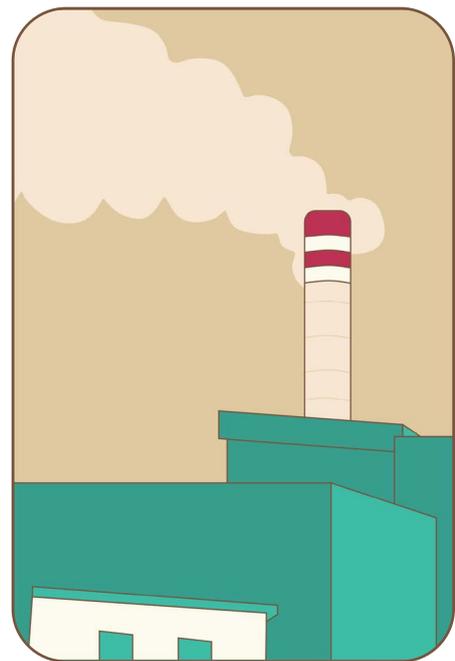
Apa Saja Kasus Korupsi yang Berkaitan dengan Krisis Iklim?

Beberapa contoh kasus adalah:

1. Korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan kontributor emisi yang memperburuk krisis iklim.¹² Contoh kasus korupsi yang berkaitan dengan PLTU yaitu kasus proyek pembangunan infrastruktur PLTU Riau-1 yang melibatkan praktik suap menyuap. Aktor dalam kasus ini adalah bekas anggota DPR RI Eni Maulani Saragih, bekas Menteri Sosial Idrus Marham, dan pemilik saham Blackgold Natural Resources (BNR) Johannes Kotjo.¹³

Johannes memberikan suap kepada Eni dan Idrus agar BNR bisa menggarap proyek PLTU Riau 1. Eni menerima suap sebesar Rp4,75 miliar,¹⁴ dan Idrus sebesar Rp2,25 miliar.¹⁵ Johannes divonis 4,5 tahun penjara.¹⁶



12 International Energy Agency, "It's Critical to Tackle Coal Emissions", 8 Oktober 2021, <https://www.iea.org/commentaries/it-s-critical-to-tackle-coal-emissions>

13 Kompas.com, "Perjalanan kasus PLTU Riau-1 Hingga Vonis Bebas Sofyan Basir", 4 November 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/04/14170361/perjalanan-kasus-pltu-riau-1-hingga-vonis-bebas-sofyan-basir?page=all>

14 Detik News, "Eni Saragih Divonis 6 Tahun Penjara", 1 Maret 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4449663/eni-saragih-divonis-6-tahun-penjara>

15 Asumsi.co, "Idrus Marham dan Kasus Suapnya Hingga Divonis 3 Tahun Penjara", 4 Maret 2021, <https://asumsi.co/post/58048/idrus-marham-dan-kasus-suapnya-hingga-divonis-3-tahun-penjara/>

16 Kompas.com, "Hukuman Johannes Kotjo Diperberat Jadi 45 Tahun Penjara", 11 Februari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/11/12580611/hukuman-johannes-kotjo-diperberat-jadi-45-tahun-penjara>

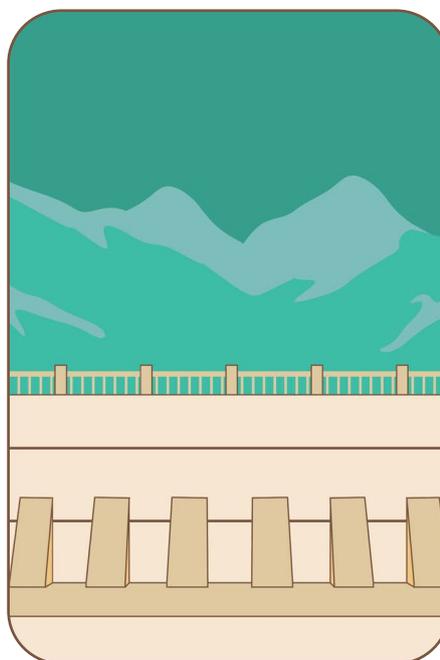
Sementara Eni dan Idrus masing-masing divonis 6 tahun penjara dan 2 tahun penjara

2. Korupsi dalam Upaya Adaptasi Iklim

Upaya adaptasi iklim dengan membangun proyek infrastruktur penahan banjir pernah dilakukan melalui proyek reklamasi Teluk Jakarta. Akan tetapi, proyek tersebut terhambat akibat kasus korupsi.

Bekas Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi dengan uang sebesar Rp2 miliar.¹⁷ Ariesman memberikan suap tersebut terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI.¹⁸ Sanusi divonis 7 tahun penjara,¹⁹ dan Ariesman divonis 3 tahun penjara.²⁰

Terlepas dari perdebatan mengenai tujuan sebenarnya dari proyek ini, yakni penahan banjir atau kepentingan bisnis semata,²¹ praktik lancung dalam kasus ini menunjukkan bahwa upaya adaptasi iklim rentan akan korupsi.



3. Korupsi PT PLN dan Retrofit PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut proyek modifikasi (**retrofit**) PLTU di PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan.²²

KPK menengarai terdapat rekayasa nilai anggaran pengadaan dan pemenang lelang hingga memunculkan kerugian keuangan negara. Proyek *retrofit system sootblowing* atau penggantian komponen suku cadang untuk mendukung pembuatan uap di PLTU

17 Detik News, "Sidang Suap Reklamasi Sanusi Akui Terima Rp 2 Miliar dari Ariesman", 1 Desember 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3359926/sidang-suap-reklamasi-sanusi-akui-terima-rp-2-miliar-dari-ariesman>

18 Detik News, "Kasus Korupsi Reklamasi, Vonis Sanusi Diperberat Jadi 10 Tahun Bui", 29 Agustus 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3619895/kasus-korupsi-reklamasi-vonis-sanusi-diperberat-jadi-10-tahun-bui>

19 CNN Indonesia, "Vonis Terpidana Reklamasi Jakarta Dikurangi, Hakim Beda Opini", 2 November 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191102124844-12-445082/vonis-terpidana-reklamasi-jakarta-dikurangi-hakim-beda-opini>

20 Detik News, "Divonis 3 Tahun Bui, Ariesman Widjaja Pikir-pikir Dulu", 1 September 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3289109/divonis-3-tahun-bui-ariesman-widjaja-pikir-pikir-dulu#:~:text=Ariesman%20Widjaja%20divonis%203%20tahun,dan%20denda%20Rp%20200%20juta>

21 LBH Jakarta, "Reklamasi Teluk Jakarta Untuk Cegah Banjir, Benarkah?", 13 November 2015, <https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-untuk-cegah-banjir-benarkah/>

22 Kompas.com, "KPK Sebut Negara Rugi Puluhan Miliar dalam Dugaan Korupsi di PT PLN", 21 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/16350311/kpk-sebut-negara-rugi-puluhan-miliar-dalam-dugaan-korupsi-di-pt-pln>

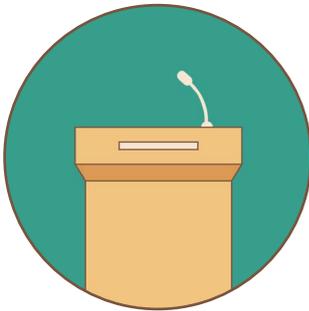


Bukit Asam tersebut bernilai hingga Rp70 miliar.²³

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, namun belum mengungkap identitas mereka.²⁴ Kasus ini menunjukkan PT PLN dan proyek *retrofit* PLTU rentan akan korupsi.

Apa saja titik rawan korupsi dalam JETP?

Terdapat sedikitnya lima titik rawan korupsi JETP, yaitu:



01

Regulatory Capture

Pengambilan kebijakan mengenai JETP dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, politisi, ataupun birokrasi.

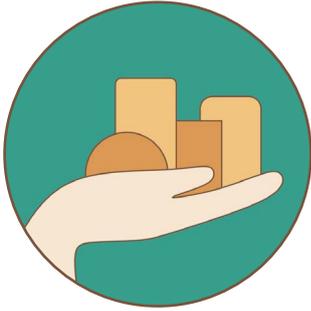
Penganggaran
Anggaran JETP menguntungkan kepentingan pihak tertentu.

02



23 Detik News, "KPK Usut Dugaan Korupsi PLN Sumbagsel, Sudah Ada Tersangka", 19 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7250093/kpk-usut-dugaan-korupsi-pln-sumbagsel-sudah-ada-tersangka>

24 Kompas.com, "KPK Sebut Negara Rugi Puluhan Miliar dalam Dugaan Korupsi di PT PLN", 21 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/16350311/kpk-sebut-negara-rugi-puluhan-miliar-dalam-dugaan-korupsi-di-pt-pln>



03

Implementasi

Proses implementasi JETP seperti pembangunan proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) rentan akan dikorupsi.

Pelaporan

Manipulasi laporan rentan terjadi.

04



05

Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum lemah.

Konflik kepentingan serta praktik suap-menyuap rawan terjadi dalam lima titik tersebut.

Bagaimana potret korupsi Pengadaan dan proyek infrastruktur?

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kegiatan utama dalam rangkaian transisi energi di bawah skema JETP. Namun, pengadaan infrastruktur adalah salah satu sektor yang rentan untuk dikorupsi. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 hingga 2022, korupsi pengadaan infrastruktur mencapai 60% atau sebanyak 952 dari total 1586 pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersangkut kasus korupsi. Mempertimbangkan fokus dan besaran anggaran, serta kasus korupsi yang berkaitan dengan krisis iklim yang selama ini terjadi, proyek infrastruktur serta proses pengadaan barang dan jasa harus mendapat perhatian khusus. Itu mesti dilakukan tanpa menghilangkan perhatian sepenuhnya terhadap titik rawan lainnya.

Apa Saja Celah dan Pola Korupsi Pengadaan dan Proyek Infrastruktur?

Secara umum, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui 5 tahap meliputi perencanaan, persiapan, proses pemilihan, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan, dan serta serah terima hasil pekerjaan. Pada praktiknya, hampir seluruh rangkaian proses tersebut memiliki celah tersendiri yang memungkinkan korupsi untuk masuk dan terjadi di dalamnya, sebagaimana dimuat dalam tabel di bawah ini:

Perencanaan	Pemilihan	Kontrak	Pelaksanaan	Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> • Suap legislatif / Pejabat • Anggaran • Pengaturan proyek / ijon • Pengaturan spek • Duplikasi proyek • Penyelewengan / penggelapan anggaran • Memecah paket 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen admin dan syarat palsu • Jual-beli / sewa dokumen admin & syarat kualifikasi • Persekongkolan horizontal / arisan / pengaturan harga • Persekongkolan vertikal dan suap • Pengubahan spek setelah kompetisi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mark-up</i> / jual ulang • <i>Mark-down</i> & tukar aset / layanan negara • <i>Proxy</i> / jual bendera • Harga timpang • <i>Kickback</i> dan komisi • Pengubahan kontrak tanpa adendum • pengubahan spek setelah pemilihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek fiktif • Proyek terbengkalai / tidak sesuai spesifikasi • Wanprestasi: • Sub-kontrak ilegal • Pemerasan / pungli 	<ul style="list-style-type: none"> • Suap auditor & pengaturan audit • Menghilangkan temuan / bukti • Meringankan hukuman • Serah terima sebelum selesai • Berita acara / laporan fiktif

Pola Korupsi Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Indonesia Corruption Watch (ICW), 2024

Rekomendasi

- Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam seluruh kerja-kerja JETP
- Membentuk regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip antikorupsi sebagai basis pelaksanaan JETP
- Memperkuat pengawasan pada titik rawan korupsi JETP
- Membuka dan menjamin ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan



Indonesia Corruption Watch
Jakarta, Juni 2024

